

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS

2.1 *Review Hasil Penelitian Terdahulu*

Penelitian yang dilakukan oleh Rimbano (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas sudah dilaksanakan. Sudah adanya pemisahan tugas antar bagian yang berwenang pada bagiannya masing-masing. Sehingga dapat mencegah resiko kecurangan/*fraud* yang dapat dilakukan oleh pihak karyawan dan dapat berakibat pada pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Yang dikarenakan kurangnya informasi perusahaan serta dapat merugikan perusahaan. Karena rasionalisasi dari pemisahan tugas adalah bahwa tugas dari seorang karyawan seharusnya dapat memberikan dasar yang memadai untuk mengevaluasi pekerja karyawan lainnya. Jadi hasil pekerjaan seorang karyawan dapat diperiksa secara silang (*cross check*) kebenarannya oleh karyawan lainnya. Praktik yang sehat pada PT. Mandiri Tunas Finance Kota Lubuklinggau seorang sales office memeriksa kelengkapan dokumen kredit customer sebelum melakukan survey. Dan diotorisasi oleh pihak yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan putusan kredit seperti pimpinan atau atasan lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Saifi et al. (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur dapat dinilai dari empat unsure pengendalian intern dan dilaksanakan dengan cukup baik namun masih terdapat beberapa kelemahan. Yaitu masih adanya perangkapan tugas yang dapat menyebabkan kecurangan dan belum ada petugas penilai jaminan. Perjanjian kredit dan pengikatan jaminan sudah ditangani oleh pejabat-pejabat kompeten dan sesuai prosedur yang tepat yaitu bagian kredit yang bekerjasama dengan pihak ketiga (Notaris dan Jasa Asuransi) sehingga meminimalkan resiko kredit. Penggunaan formulir sudah bernomor cetak hanya sebagian dari keseluruhan proses. Pada saat pemberian otorisasi dapat terlaksana dan dapat menetapkan

pertanggungjawaban terlaksananya transaksi. Pada fungsi administrasi kredit, bagian kasir pemasaran hanya mencetak satu lembar kwitansi untuk diberikan kepada nasabah, sedangkan sebagai kebutuhan arsip hanya menggunakan form SPPK yang dicetak rangkap 2 (dua). Pemeriksaan mendadak dilaksanakan berdasarkan rekomendasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) belum ada pengawasan rutin. Tidak dilaksanakannya perputaran jabatan (*Job Rotation*) sehingga rawan terjadinya persekongkolan dan sehingga dapat memicu terjadinya kecurangan/fraud.

Penelitian yang dilakukan oleh Muzamil (2015), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal penyaluran kredit PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Karang Paci Samarinda masih terdapat kekurangan dari pemisahan fungsi tugas dan perputaran jabatan. Saran utama dari penulis bagi PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Karang Paci Samarinda sebaiknya BRI Unit Karang Paci Samarinda memisahkan fungsi tugas di bagian kredit agar tidak terjadi perangkapan tugas seperti teori yang dikemukakan oleh Mulyadi tentang unsur-unsur sistem pengendalian internal tahun 2008.

Penelitian yang dilakukan oleh Harun (2013), hasil penelitian penerapan prosedur pengendalian intern dalam pemberian kredit sudah efektif sesuai dengan teori pengendalian intern yang baik menurut COSO hanya saja belum terdapat bagan struktur organisasi dan flowchart proses kredit dalam BRI Kantor Cabang Pembantu Boulevard Manado. Adanya laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya sebagai salah satu hasil yang diperoleh atas diterapkannya audit internal setiap bulan untuk evaluasi kinerja bank dan audit internal secara keseluruhan setahun sekali. Monitoring dilakukan setiap hari oleh manajemen bank lewat media komunikasi dan informasi yang handal dan dapat diakses dengan cepat untuk memudahkan pengambilan keputusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pemi et al. menyatakan bahwa hasil penelitian sistem pengendalian kredit sudah berjalan dengan baik tetapi belum bias dikatakan efektif dikarenakan ada kredit khusus dibagian investasi tetapi bank masih bias dibilang bank sehat terbukti dari persentasi kredit, kredit ini termasuk dalam kredit macet yaitu sebesar 1%. maka kantor cabang dikatakan

sehat dikarenakan masih sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional menetapkan rasio kredit macet lebih dari netto 5%. Sistem pengendalian internal pada pemberian kredit yang sudah diterapkan pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya memenuhi unsur-unsur pengendalian internal. Pihak Bank Danamon memiliki cara pengendalian internal dalam proses pemberian kredit untuk mencegah dari adanya penyalahgunaan wewenang sehingga bisa mengakibatkan kerugian pada pihak Bank dan bisa mencegah adanya kredit macet atas pemberian kredit. Sehingga PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Kantor Cabang Kembang Jepun Surabaya bisa dibilang bank yang sehat dan sistem pengendalian internal berjalan dengan baik walaupun belum bisa dibilang efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Lisbet Sibarani et al. menyatakan bahwa hasil penelitian ditemukan bahwa efektivitas pengendalian internal secara signifikan mempengaruhi kualitas MAIS. Studi juga ditemukan hasil control aplikasi, terutama dalam mengendalikan proses menjadi yang paling kuat dimensi dalam membentuk pengendalian internal badan usaha milik negara (BUMN). Dalam kualitas MAIS, MAIS dimensi fleksibilitas menjadi bagian terkuat yang berbentuk dan fleksibilitas MAIS akan memudahkan pekerjaan penyelesaian.

Penelitian yang dilakukan oleh Joseph Nartey et al. menyatakan bahwa Penelitian ini mengevaluasi komponen pengendalian lingkungan dan pemantauan komponen Sistem Pengendalian Intern Bank Ghanaian yang menggunakan prinsip dan atribut COSO menilai efektivitas sistem pengendalian internal. Skala Likert lima titik dulu mengukur pengetahuan dan persepsi responden tentang pengendalian internal dan internal bank efektivitas sistem kontrol. Tanggapan berkisar dari sangat tidak setuju untuk sangat setuju, dimana saya sangat tidak setuju (SD) dan 5 diwakili sangat setuju (SA) Statistik Paket Ilmu Sosial (SPSS) digunakan untuk menganalisa data dan disajikan dalam bentuk sarana dan standar deviasi untuk setiap pertanyaan dan setiap bagian dari kuesioner. Itu Studi menemukan bahwa, kontrol kuat ada di lingkungan pengendalian dan pemantauan komponen kegiatan sistem pengendalian intern bank di Ghana. Dua komponennya dinilai tinggi oleh responden dengan rata-rata masing-masing 4,72 dan 4,66. Itu

Studi tersebut merekomendasikan bahwa dewan bank di Ghana tidak boleh berpuas diri mengenai temuan namun harus bekerja keras untuk memastikan pengendalian internal yang berkesinambungan dan terpisah memantau untuk memastikan bahwa kontrol benar-benar ada dan berfungsi dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Kogulacumar menyatakan bahwa komunikasi sangat vital untuk dilakukan bisnis atau aktivitas perusahaan. Begitu banyak penyedia komunikasi di Sri Lanka. Maka dari itu dilakukan penelitian pengendalian internal kegiatan perusahaan diteruskan secara efektif.. Persentase, Korelasi dan Analisis SWOT adalah alat utama yang digunakan dalam analisis. Temuan penelitian menunjukkan ada yang kuat hubungan antara sistem pengendalian internal dan kinerja organisasi dari Sri Lanka Telecom terbatas. Dan juga kontrol internal Sri Lanka Telecom terbatas akan menghasilkan kinerja organisasi yang tinggi di Indonesia masa depan.

2.2 Sistem Pengendalian Internal

2.2.1 Definisi Sistem Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2010:165), Pengendalian intern adalah Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Menurut Romney dan Steinbart (2009:229), Pengendalian Intern adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga asset, memberikan informasi yang akurat dan andal mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

Sistem pengendalian intern yang baik harus mempunyai struktur pengendalian intern yang baik pula, yaitu harus mempunyai prosedur dan tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas disini dimaksudkan bahwa struktur pengendalian intern suatu perusahaan terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur

yang ditetapkan untuk memberikan cukup kepastian akan sasaran dan tujuan perusahaan yang akan dicapai.

Menurut Gondodiyoto (2010:250) pengendalian internal dapat dibedakan dalam berbagai segi pandang yaitu :

- a. *Preventif Controls*, yaitu pengendalian intern yang dirancang dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dan penyalahgunaan. Contoh jenis pengendalian ini adalah desain formulir yang baik, item-nya lengkap, mudah diisi, serta *user training* atau pelatihan kepada orang-orang yang berkaitan dengan input sistem, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan. Menurut Romney & Steinbart (2003: 195). Pengendalian untuk pencegahan (*preventive control*) mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul. Memperkerjakan personel akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas dan informasi, merupakan pencegahan yang efektif. Oleh karena tidak semua masalah mengenai pengendalian dapat dicegah. Pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dikerjakan dengan maksud supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Untuk menghindari tindakan penyimpangan dapat digunakan dengan beberapa cara antara lain :
 - 1.) Mengadakan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tata cara suatu kegiatan atau dibuat tata tertib.
 - 2.) Membuat pedoman-pedoman kerja.
 - 3.) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pembuat kesalahan.
 - 4.) Menetapkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab.
 - 5.) Mengorganisasikan segala macam kegiatan.
 - 6.) Menentukan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
- b. *Detection Control*, adalah pengendalian yang didesain dengan tujuan agar apabila direkam/dikonversi dari media sumber untuk ditransfer ke sistem computer dapat dideteksi bila terjadi kesalahan (maksudnya tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan). Contoh jenis pengendalian ini adalah misalnya jika seseorang mengambil uang di ATM, maka seharusnya program computer mendeteksi jika dana tidak cukup, atau saldo minimum tidak

mencukupi, atau melebihi jumlah maksimal yang diinginkan untuk pengambilan tiap harinya.

Menurut Romney & Steinbart (2003:195), Pengendalian untuk pemeriksa (*detective control*) dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul.

- c. *Corrective Controls*, ialah pengendalian yang sifatnya jika terdapat data yang sebenarnya error tetapi tidak terdeteksi oleh *detection control*, atau data yang error yang terdeteksi oleh program validasi, harus ada prosedur yang jelas tentang bagaimana melakukan pembetulan terhadap data yang salah dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan kerugian kalau kesalahan/penyalahgunaan tersebut sudah benar-benar terjadi. Menurut Romney & Steinbart (2003:195), Pengendalian korektif (*corrective control*) memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan, dan mengubah sistem agar masalah di masa mendatang dapat diminimalisasi atau dihilangkan.

2.2.2 Unsur – Unsur Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2008:164-173) unsur pokok pengendalian internal dalam perusahaan adalah :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. Dalam setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat ke dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan (*reliability*) yang tinggi.

3. Praktik-praktik yang sehat. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh perusahaan dalam menciptakan praktek yang sehat adalah :
 - 1) Penggunaan formulir bernomor urut cetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
 - 2) Pemeriksaan Mendadak (*Surprised Audit*).
 - 3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa campur tangan dari orang atau satu unit organisasi lain.
 - 4) Perputaran jabatan (*job rotation*).
 - 5) Keharusan pengambilan cuti bagi pegawai yang berhak.
 - 6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya.
 - 7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektifitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain (*Internal control*).
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya perlu adanya seleksi calon karyawan dan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan.

2.2.3 Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pertama direncananya pengendalian intern dari segi pandang manajemen menurut Gondodiyoto (2010:257) ialah untuk dapat diperolehnya data yang dapat dipercaya, yaitu jika data lengkap, akurat, unik, rasional, dan kesalahankesalahan data terdeteksi. Tujuan berikutnya adalah dipatuhinya kebijakan akuntansi yang akan dicapai jika data diolah tepat waktu, penilaian, klasifikasi dan pisah batas waktu terjadi transaksi akuntansi tepat. Tujuan selanjutnya adalah pengamanan asset yaitu dengan adanya otoritas, distribusi output, data valid dan diolah serta disimpan secara aman.

Tujuan direncananya sistem pengendalian intern dari kaca pandang terkini dan yang sudah mencakup lingkup yang lebih luas pada hakikatnya adalah untuk melindungi harta milik perusahaan, mendorong kecermatan dan kehandalan data

dan pelaporan akuntansi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan dan aturan-aturan yang ada.

Suatu sistem pengendalian yang efisien dan efektif sangat dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan karena adanya sistem pengendalian, diharapkan rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Mulyadi (2008:163) menyatakan bahwa tujuan pengendalian internal adalah :

1. Menjaga keamanan kekayaan perusahaan
 - 1) Penggunaan kekayaan organisasi hanya melalui dari sistem otorisasi yang telah diterapkan.
 - 2) Pertanggung jawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan sesungguhnya ada.
2. Mengecek ketelitian dan kebenaran data akuntansi perusahaan
 - 1) Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan.
 - 2) Pencatatan transaksi yang telah terjadi dalam catatan akuntansi.
- 3) Mendorong efisiensi
- 4) Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

2.2.4 Elemen-Elemen Sistem Pengendalian Internal

COSO atau *Committee of Sponsoring Organizations of the Treatway Commission* memperkenalkan adanya lima komponen pengendalian intern yang meliputi Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*), Penilaian Resiko (*Risk Assesment*), Prosedur Pengendalian (*Control Procedure*), Pemantauan (*Monitoring*), serta Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*). Perusahaan membutuhkan lima komponen diatas, untuk memastikan bahwa sebuah perusahaan memiliki control yang kuat atas kegiatan mereka. Sejauh mana setiap komponen yang diimplementasikan oleh perusahaan. Berikut ini penjelasannya masing – masing :

1. Lingkungan Pengendalian

Setiap organisasi, tidak perlu apakah perusahaan tersebut perusahaan besar atau kecil, tetapi perusahaan itu harus memiliki lingkungan pengendalian

yang kuat. Jika lingkungan pengendalian lemah kemungkinan besar diikuti lemahnya komponen pengendalian internal yang lain.

Lingkungan pengendalian meliputi faktor-faktor berikut :

- 1) Filosofi manajemen dan gaya operasi
Manajer harus mengambil tindakan aktif untuk menjadi contoh berperilaku etis dengan bertindak sesuai dengan kode etik personal. Manajer juga bertanggung jawab menyusun kode etik perusahaan dan memperlakukan karyawan adil dan hormat.
- 2) Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika
Penting bagi manajer untuk menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada integritas dan nilai-nilai etika. Perilaku etis atau tidak etis manajer dan karyawan berdampak besar terhadap keseluruhan pengendalian internal.
- 3) Komitmen terhadap kompetensi
Perusahaan harus merekrut karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya guna mendorong kreatifitas dan inisiatif dalam menghadapi kondisi yang dinamis.
- 4) Komite audit dari dewan direksi
Dewan direksi bertanggung jawab untuk memilih komite audit yang beranggota orang-orang luar dari perusahaan. Peran komite audit adalah memantau akuntansi perusahaan serta praktik dan kebijakan pelaporan keuangan.
- 5) Struktur organisasi
Perusahaan menggambarkan pembagian otoritas dan tanggung jawab perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
- 6) Metode penetapan otoritas dan tanggung jawab
Hak yang dimiliki karena posisi formal seseorang untuk memberi perintah ke bawah.
- 7) Kebijakan dan praktis sumber daya manusia
Kegiatan sumber daya manusia meliputi perekrutan karyawan baru, orientasi karyawan baru, pelatihan karyawan, motivasi karyawan,

evaluasi karyawan, promosi karyawan, kompensasi karyawan, perlindungan karyawan dan pemberhentian karyawan.

2. Penaksiran Resiko

Semua perusahaan, baik besar maupun kecil pasti menghadapi resiko internal maupun eksternal dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Resiko itu bersumber dari:

- a. Tindakan tidak sengaja
- b. Tindakan sengaja
- c. Bencana alam atau kerusuhan politik
- d. Kesalahan perangkat lunak dan kegagalan peralatan komputer

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian yang terkait dengan pelaporan keuangan antara lain meliputi:

- a. Desain dokumen yang baik dan bernomor urut cetak
- b. Pemisahan tugas
- c. Otoritas yang memadai atas setiap transaksi bisnis yang terjadi
- d. Mengamankan harta dan catatan perusahaan
- e. Menciptakan adanya pengecekan independen atas pekerjaan karyawan lain

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus diidentifikasi, diproses dan dikomunikasikan ke personil yang tepat sehingga setiap orang dalam perusahaan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Tujuan utama sebuah sistem informasi akuntansi antara lain:

- a. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang valid
- b. Mengklasifikasi transaksi sebagaimana seharusnya
- c. Mencatat transaksi sesuai dengan nilai moneter yang tepat
- d. Mencatat transaksi pada periode yang tepat
- e. Menyajikan transaksi dan pada periode akuntansi yang tepat
- f. Pengawasan Kinerja

Kegiatan utama dalam pengawasan kinerja meliputi :

- a) Supervisi yang efektif meliputi pelatihan karyawan, memonitor kinerja karyawan, mengkoreksi kesalahan yang dilakukan, serta mengamankan harta dengan mengawasi karyawan yang memiliki akses terhadap perusahaan.
- b) Akuntansi pertanggung jawaban
 - 1) Penyusunan anggaran, kuota, penjadwalan, harga pokok standart, dan standart kualitas.
 - 2) Laporan kinerja yang membandingkan kinerja aktual dengan rencana, dan menginformasikan jika ada penyimpangan yang signifikan.
 - 3) Prosedur untuk investigasi penyimpangan yang signifikan dan mengambil tindakan untuk mengoreksi kondisi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.
- c) Pengauditan Internal
 - 1) Review terhadap reabilitas dan integritas informasi operasional dan informasi finansial
 - 2) Penilaian terhadap efektivitas pengendalian internal
 - 3) Evaluasi kepatuhan karyawan terhadap kebijakan, prosedur manajemen dan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku
 - 4) Evaluasi terhadap efektivitas dan efesiensi manajemen.

2.3 Kredit

2.3.1 Definisi Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere*, yang berarti kepercayaan atau *credo* yaitu saya percaya. Pemberi kredit (kreditur) percaya kepada penerima kredit (debitur) bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Bagi debitur, kredit yang diterima merupakan kepercayaan yang berarti menerima amanah sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Kredit juga merupakan kemampuan seseorang atau badan usaha untuk menggunakan uang, barang, atau jasa yang diterimanya dihubungkan dengan kemampuan untuk mengembalikan setelah jangka waktu tertentu.

Hermansyah (2008:57), dalam bukunya yang berjudul Hukum Perbankan Nasional Indonesia, memberikan pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain. Menurut pasal 21 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perkreditan dalam Firdaus (2009:2), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Suyatno (2007:12) kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta, atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang.

Walaupun pengertian kredit berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama. Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kredit adalah pemberian pinjaman barang, uang atau jasa antara pemberi pinjaman atau bank (kreditur) dengan penerima pinjaman atau nasabah (debitur) atas dasar kepercayaan dan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antara kreditur dengan debitur, dan dikembalikan pada jangka waktu atau tanggal yang telah disepakati antara keduanya.

2.3.2 Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2008:100) , diantaranya :

1. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit. Hasil yang di dapat dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi dan dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

2.3.3 Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2008:105) Memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki suatu fungsi yang sangat luas. Fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang akan memperoleh tambahan uang dari lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga barang yang beredar dapat bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan usahanya dan nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberi kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

2.3.4 Unsur – Unsur Pemberian Kredit

Dari beberapa pengertian kredit diatas dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit. Adapun unsur-unsur kredit (Kasmir:2004) tersebut adalah :

1. Kepercayaan

Suatu keyakinan bagi kreditur bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, jasa atau barang) akan benar-benar diterimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit yang sudah ditentukan.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan batas waktu untuk pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau kredit macet. Semakin panjang jangka waktu kredit maka semakin besar pula risikonya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan namanya bunga.

2.3.5 Jenis - Jenis Kredit

Ada beberapa jenis kredit yang dikemukakan menurut Kasmir (2010:76) adalah :

1. Dilihat Dari Segi Kegunaan

1) Kredit Investasi

Merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha.

2) Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat Dari Segi Tujuan Kredit

1) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha, produksi dan investasi. kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

2) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi.

3) Kredit Perdagangan

Kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membeli aktivitas perdagangan.

3. Dilihat Dari Segi Jangka Waktu

1) Kredit Jangka Pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

2) Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

3) Kredit Jangka Panjang

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu tiga sampai lima tahun.

4. Dilihat Dari Segi Jaminan

1) Kredit Dengan Jaminan

Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan.

2) Kredit Tanpa Jaminan

Kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

1) Kredit Pertanian

Kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian.

2) Kredit Peternakan

Kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3) Kredit Industri

Kredit yang diberikan untuk membiayai industri kecil, industri menengah dan industri besar.

4) Kredit Pertambangan

Kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang.

5) Kredit Pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

6) Kredit Profesi

Kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional.

7) Kredit Perumahan

Kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

2.3.6 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum fasilitas kredit diberikan, maka bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan kembali, keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan, untuk mendapatkan nasabah yang benar - benar layak untuk diberikan pinjaman, dilakukan dengan analisis 5 C dan 7 P, penilaian dengan analisis 5 C menurut Kasmir (2008:117) adalah sebagai berikut :

1. Watak (*character*)

Sifat atau watak seseorang, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya.

2. Kapasitas (*capacity*)

Analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit, dari penilaian dapat terlihat kemampuan nasabah atau kreditur dalam mengelola bisnis, kemampuan ini dihubungkan dengan pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. Modal (*capital*)

Digunakan untuk melihat penggunaan modal, apakah efektif atau dapat dilihat dari laporan keuangan (nearaca dan laporan laba-rugi) yang disajikan dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. Kondisi (*condition*)

Menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang, penilaian kondisis atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

5. Jaminan (*collateral*)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Sedangkan penilaian kredit dengan analisis 7 P antara lain:

a. Kepribadian (*personality*)

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu.

b. Kelompok (*party*)

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

c. Maksud atau tujuan (*purpose*)

Untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

d. Kemungkinan atau harapan (*prospect*)

Untuk menilai usaha calon nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. Pembayaran (*payment*)

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana kredit dikembalikan.

f. Profitabilitas (*profitability*)

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, *profitability* diukur dari periode akan tetap sama atau semakin meningkat, dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. Perlindungan (*protection*)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman.

2.3.7 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2009:115) prosedur pemberian kredit secara umum oleh badan hukum adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas
Pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal yang dilampiri berkas-berkas antara lain latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu dan cara pemohon mengembalikan kredit hingga jaminan kredit.
2. Penyelidikan berkas pinjaman
Tujuannya mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar agar permohonan kredit dapat segera diproses.
3. Wawancara I
Wawancara bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.
4. *On the Spot*
Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.
5. Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas bila masih ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan.
6. Keputusan kredit
Yakni menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Bila ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya
Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung, atau dengan melalui notaris.
8. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya
Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung, atau dengan melalui notaris.
9. Penyaluran atau penarikan dana
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

2.3.8 Penggolongan Kredit Bermasalah

Menurut ketentuan perbankan dalam surat keputusan Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR bertanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif, penggolongan kolektibilitas kredit dibagi menjadi 5 kategori yaitu :

1. Kredit lancar
Kredit dianggap lancar apabila pembayarannya tepat waktu, perkembangan rekening baik, dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
2. Kredit dalam perhatian khusus
Kredit dikategorikan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai 90 hari.

3. Kredit kurang lancar

Kredit dianggap kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.

4. Kredit diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari serta terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.

5. Kredit macet

Kredit dikategorikan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang melampaui 270 hari.

2.3.9 Faktor – Faktor Terjadinya Kredit Bermasalah

1. Faktor Nasabah

- a. Nasabah menyalahgunakan kredit yang diperolehnya, penyalahgunaan pembelian bahan baku dilakukan untuk pembelian aset yang lainnya.
- b. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya, dikarenakan nasabah kurang menguasai bidang usaha akhirnya usaha itu tidak berjalan dengan baik.
- c. Nasabah beritikad tidak baik, kredit yang awalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi saja dan biasanya sebelum jatuh tempo kredit nasabah malah memilih untuk kabur atau menghindari untuk bertanggung jawab membayar kredit tersebut.
- d. Perilaku nasabah, bisa dilihat dari situasi nasabah yaitu yang sering tidak menjawab telepon dari pihak bank, kesehatan menurun, meninggalnya nasabah, dan lain-lain.

a. Faktor Internal

Faktor internal perbankan yang meliputi kelemahan dalam analisis kredit, kelemahan kredit agunan, kelemahan sumber daya alam, kelemahan teknologi dan kecurangan petugas bank.

b. Faktor Eskternal

Faktor eksternal bisa dilihat dari situasi ekonomi yang negatif, situasi politik dalam negeri yang merugikan, situasi alam yang merugikan dan peraturan pemerintah yang merugikan.

2. Faktor Alam

Terjadinya bencana alam yang tidak bisa diduga, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami dsb. Yang dapat mengakibatkan perputaran usaha debitur menjadi tidak efisien. Dan beresiko kredit bermasalah.

2.3.10 Pengendalian Internal Kredit

Pada umumnya pengendalian internal kredit meliputi unsure-unsur pengendalian internal berupa penelaah dan penekanan pada tujuan pengendalian yang ingin dicapai oleh perusahaan. Menurut La Midjan (2001:355) memuat prinsip-prinsip sebagai berikut :

Perlunya ada pemisahan fungsi antara :

1. Adanya fungsi pembahasan kredit pada bagian analisa kredit.
2. Fungsi realisasi kredit pada bagian penyelenggara kredit atau administrasi kredit.
3. Fungsi pengawasan kredit berada pada bagian pengawasan kredit.
4. Perlu disusun pencatatan dan pelaporan harian yang baik dan tepat waktu mengenai posisi dana dengan kredit.
5. Perlu penyusunan ikhtisar mutasi keuangan setiap bulan.
6. Perlu pelaksanaan investarisasi fisik dalam waktu yang pendek berikut dengan pengawasan administratif.
7. Penandatanganan surat-surat berharga oleh dua orang pejabat.
8. Perlu disusun pencatatan dan pengarsipan surat-surat dan berkas pemberian kredit.

Tujuan pengendalian intern kredit menurut Mulyono (2001: 463) adalah sebagai berikut :

- a. Agar penjagaan atau pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank dibidang perkreditan dapat dilakukan dengan baik untuk menghindari penyelewengan baik dari pihak ekstern bank maupun intern bank.
- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data akuntansi di bidang perkreditan.
- c. Untuk meningkatkan efisiensi di dalam pengelolaan dan tata laksana saha di bidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada.

Tujuan pengendalian internal kredit di atas ketiganya saling berkaitan. Seperti adanya administrasi kredit yang dilaksanakan secara teliti dan benar akan membantu dan mempermudah menemukan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Adanya dokumentasi yang baik terhadap arsip-arsip perkreditan akan memaukan efisiensi pengelolaan di bidang perkreditan. Beberapa indikator pengendalian internal pemberian kredit yang efektif yang merupakan tujuan dari pengendalian internal pemberian kredit, yaitu meliputi adanya :

- a. Pemberian kredit sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan dan prosedur - prosedur serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank.
- b. Adanya keamanan kredit.
- c. Adanya keuntungan bank dalam bentuk bunga.
- d. Penggunaan kredit sesuai dengan rencana yang telah diajukan.
- e. Pemberian kredit yang selektif berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank.
- f. Tingkat kolektibilitas yang tinggi.
- g. Pengembalian kredit sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

2.3.11 Prinsip Kehati-hatian dalam Undang-Undang Perbankan

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati(*prudent*) dalam melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada suatu bank (Mulyadi:2012). Hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU No 10 tahun 1998 sebagai perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dalam prinsip kehati-hatian perkreditan (Tawaf, 1999) berkaitan dengan :

1. Kebijakan pokok perkreditan, terdiri dari prosedur kredit yang sehat, kredit yang mendapat perhatian khusus, perlakuan kredit yang plafondering, prosedur penyelesaian kredit bermasalah, penghapusbukuan, dan pelaporan kredit macet, tata cara penyelesaian barang agunan kredit.
2. Kebijakan bank dalam pemberian kredit pada pihak terkait terdiri dari Batasan jumlah maksimum kredit yang diberikan, Tata cara penyediaan kredit, Persyaratan kredit, Kebijakan pemenuhan ketentuan perkreditan.
3. Pemecahan kredit yang perlu dihindari bank. Tata cara penilaian kualitas kredit, hasil penilaian kolektibilitas kredit telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

2.3.12 Pedoman Sistem Pengendalian Intern Perbankan

Sistem pengendalian pada proses pemberian kredit pada hakikatnya menginginkan agar sasaran kredit tercapai baik bagi bank maupun nasabahnya, serta untuk menghindari terjadinya kredit macet. Menurut SE No.05/22/DPNP Bank Indonesia, penerapan sistem pengendalian intern dalam perbankan meliputi:

1. *Management Oversight and Control Culture* (Pengawasan oleh manajemen dan Kultur Pengendalian)

Pengawasan oleh pihak manajemen dan kultur pengendalian merupakan suatu hal yang harus dipertanggungjawabkan dan dijunjung tinggi oleh semua pihak-pihak yang terkait pada manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk karena berperan penting dalam kegiatan operasional Bank. Untuk memastikan kegiatan Bank sesuai dengan prosedur serta peraturan yang berlaku sehingga dapat membantu dalam tercapainya rencana kerja yang telah ditetapkan serta tercapainya tujuan perusahaan. Dengan cara sebagai berikut :

- a) Dewan komisaris berperan secara aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan bank yang dapat mengurangi efektivitas pengendalian intern.

- b) Dewan komisaris melakukan kajian ulang terhadap evaluasi pelaksanaan pengendalian intern yang dibuat oleh auditor intern dan auditor ekstern.
- c) Memelihara struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas.
- d) Memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian intern telah dilaksanakan oleh pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai.

2. *Risk Recognition and Assessment* (Identifikasi dan Penilaian Resiko)

Penilaian resiko merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai resiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Resiko dapat timbul dan berubah sesuai dengan kondisi bank, antara lain perubahan kegiatan operasional bank, perubahan susunan personalia, perubahan sistem informasi, pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu, perkembangan teknologi, perubahan dalam sistem akuntansi, dan hukum yang berlaku.

3. *Control Activities and Segregation of Duties* (Kegiatan pengendalian dan Pemisahan Fungsi Tugas)

Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Kegiatan pengendalian antara lain kaji ulang kinerja operasional, kaji ulang manajemen, pengendalian sistem informasi, pengendalian aset fisik, dokumentasi, pemisahan fungsi.

4. *Accountancy, Information and Communication* (Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi)

Infomasi mengacu pada sistem akuntansi organisasi yang terdiri dari metode dan catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi,

menganalisis, mengelompokan, mencatat dan melaporkan transaksi yang terjadi dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan utang Bank. Dengan cara sebagai berikut :

- a) Proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen dilaksanakan secara berkala. Setiap penyimpangan segera diinvestigasi dan diatasi permasalahannya.
- b) Sistem informasi harus menghasilkan laporan kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen resiko.
- c) Sistem informasi harus menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.
- d) Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.
- e) Sistem pengendalian intern bank harus memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pejabat dan karyawan memahami dan memenuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku.

5. *Monitoring Activities and Correcting Deficiencies* (Pemantauan tindakan koreksi atau penyimpangan)

- a) Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern.
- b) Bank harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern.
- c) Bank harus menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern.

Semua hal tersebut akan mendukung tercapainya tujuan pengendalian internal. Dengan tercapainya tujuan pengendalian internal akan mendukung terciptanya prinsip-prinsip keputusan pemberian kredit yang sesuai akan mendukung tercapainya pelaksanaan penerapan 5C.

Gambar 2.4

KERANGKA PENELITIAN